JURNAL
KEBIJAKAN PUBLIK
ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

# EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA SUNGAI PAPUYU KECAMATAN BABIRIK KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**Hardian[1], Arpandi[2], Eka Santi Agustina[3]**
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email : hardiandilan10@gmail.com

**ABSTRAK**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan instrumen strategis pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (Kementerian Sosial, 2018). Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas PKH dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Papuyu serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menggunakan metode deskriptif kualitatif (Creswell, 2014) dengan teknik purposive sampling (Sugiyono, 2020), penelitian ini melibatkan 12 informan yang terdiri dari koordinator PKH, pendamping, aparat desa, dan penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas PKH belum sepenuhnya optimal. Temuan utama mengindikasikan rendahnya pemahaman masyarakat tentang program, ketidaktepatan sasaran penerima manfaat, ketergantungan penerima terhadap bantuan, serta ketidakpastian jadwal pencairan. Faktor pendukung meliputi kerja sama antar pelaksana yang baik, pemenuhan kewajiban penerima, dan peran aktif pendamping. Sementara faktor penghambat mencakup belum terciptanya kemandirian ekonomi, keterbatasan kuota, dan pembaruan data yang tidak konsisten. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pendataan, intensifikasi sosialisasi, serta pengembangan program pemberdayaan ekonomi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas PKH.

**Kata Kunci**: Efektivitas Program, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan, Administrasi Publik

***ABSTRACT***

*The Family Hope Program (PKH) is a strategic instrument of the government in poverty alleviation efforts through a conditional cash transfer approach aimed at improving human resource quality (Ministry of Social Affairs, 2018). This study aims to analyze the effectiveness of PKH in improving community welfare in Sungai Papuyu Village and identify the influencing factors. Using a descriptive qualitative method (Creswell, 2014) with purposive sampling technique (Sugiyono, 2020), this study involved 12 informants consisting of PKH coordinators, facilitators, village officials, and beneficiaries. The results indicate that PKH effectiveness has not been fully optimal. Key findings reveal low public understanding of the program, inaccuracy of beneficiary targeting, beneficiary dependency on assistance, and uncertainty of disbursement schedules. Supporting factors include good inter-implementer cooperation, fulfillment of beneficiary obligations, and the active role of facilitators. While inhibiting factors include the lack of economic independence, quota limitations, and inconsistent data updates. This study recommends strengthening the data system, intensifying socialization, and developing sustainable economic empowerment programs to improve PKH effectiveness.*

***Keywords***: *Program Effectiveness, Family Hope Program, Community Welfare, Poverty Alleviation, Public Administration*

## PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan pembangunan yang bersifat kompleks dan multidimensional yang hingga saat ini masih menjadi isu global yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Tidak hanya terjadi di negara berkembang, kemiskinan juga masih menjadi tantangan di berbagai negara maju dengan karakteristik yang berbeda-beda. Secara konseptual, kemiskinan tidak hanya dipandang sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan yang layak, serta partisipasi dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, kemiskinan sering kali dikaitkan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan, yang pada gilirannya menciptakan lingkaran kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus.

Dalam konteks global, berbagai lembaga internasional seperti Bank Dunia dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) menekankan pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanggulangan kemiskinan melalui kebijakan perlindungan sosial yang terintegrasi (World Bank, 2020). Salah satu strategi yang banyak diterapkan adalah program bantuan sosial bersyarat atau conditional cash transfer (CCT) yang memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dengan syarat tertentu, seperti kewajiban menyekolahkan anak dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Pendekatan ini dianggap efektif karena tidak hanya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang, sehingga dapat memutus rantai kemiskinan antargenerasi (*intergenerational poverty*) (Fiszbein and Schady, 2009). Program CCT telah diimplementasikan di berbagai negara dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi, seperti Program Bolsa Familia di Brasil, Progresa-Oportunidades di Meksiko, dan Program Keluarga Harapan di Indonesia (Hastuti, Suryadarma and Bazzi, 2020).

Indonesia sebagai negara berkembang juga menghadapi permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks dengan karakteristik geografis dan sosial yang beragam. Meskipun dalam beberapa dekade terakhir angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan, jumlah penduduk miskin masih relatif besar dan tersebar di berbagai wilayah, baik perkotaan maupun pedesaan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara, 2025). Pemerintah Indonesia telah menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin’, 2011). Selain itu, komitmen Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan juga tercermin dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan pertama yaitu menghapus kemiskinan dalam segala bentuk (United Nations, 2015).

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Program ini mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 dan hingga saat ini terus mengalami pengembangan baik dari segi cakupan maupun mekanisme pelaksanaannya. Tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018). Dalam pelaksanaannya, PKH tidak hanya memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai, tetapi juga disertai dengan kewajiban bagi penerima manfaat untuk memenuhi komitmen tertentu, seperti memastikan anak bersekolah secara rutin, melakukan pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan balita, serta memberikan perhatian terhadap kelompok rentan seperti

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

lansia dan penyandang disabilitas (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). Secara regulatif, pelaksanaan PKH diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan yang menegaskan bahwa PKH tidak hanya bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, tetapi juga untuk meningkatkan taraf hidup serta mendorong kemandirian keluarga penerima manfaat (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2018).

Berbagai hasil penelitian dan data empiris menunjukkan bahwa PKH telah memberikan kontribusi positif dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Rahma, 2021). Namun demikian, dalam implementasinya di lapangan, masih ditemukan berbagai kendala yang mempengaruhi efektivitas program. Beberapa hasil penelitian dan laporan menunjukkan bahwa pelaksanaan PKH di daerah masih menghadapi persoalan terkait validitas data penerima, kurangnya koordinasi antar pelaksana, serta minimnya upaya pemberdayaan yang berkelanjutan bagi keluarga penerima manfaat (Aziz, 2024). Kondisi ini juga tercermin di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang merupakan salah satu daerah dengan jumlah penerima manfaat PKH yang cukup signifikan.

Penelitian ini dilakukan di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang masih terdapat permasalahan terkait dengan pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Pertama, kurangnya sosialisasi program sehingga kurang pahamnya keluarga penerima manfaat terhadap Program Keluarga Harapan. Sosialisasi yang belum dilakukan secara menyeluruh menyebabkan sebagian masyarakat tidak memahami tujuan, mekanisme, serta hak dan kewajiban dalam program tersebut. Akibatnya, terdapat anggapan bahwa PKH hanya berfokus pada bantuan pendidikan, padahal program ini juga mencakup aspek kesehatan dan kesejahteraan sosial. Kondisi ini membuat pemanfaatan program menjadi kurang optimal dan tidak sepenuhnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Husaini, 2022).

Kedua, permasalahan ketidaktepatan sasaran penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Sebagai program bantuan sosial bersyarat yang ditujukan khusus bagi keluarga miskin dan rentan, ketepatan dalam menentukan penerima manfaat menjadi kunci keberhasilan program. Dalam praktiknya, masih ditemukan adanya keluarga yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat tetapi belum terdaftar, sementara di sisi lain terdapat keluarga yang secara ekonomi sudah tergolong mampu namun masih menerima bantuan. Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam proses pendataan dan validasi data penerima manfaat (Haswanti, 2024). Ketidaktepatan sasaran ini tidak hanya mengurangi efektivitas program, tetapi juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

Ketiga, Program Keluarga Harapan belum sepenuhnya mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi Keluarga Penerima Manfaat. Salah satu tujuan utama PKH adalah mendorong perubahan perilaku dan peningkatan kapasitas ekonomi keluarga agar dapat keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan (Kementerian Sosial, 2018). Namun, dalam kenyataannya, sebagian keluarga penerima manfaat di Desa Sungai Papuyu masih menunjukkan tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap bantuan PKH. Bantuan yang diterima cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif jangka pendek, tanpa diimbangi dengan upaya peningkatan pendapatan atau pemberdayaan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa program PKH belum sepenuhnya berhasil dalam menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat (Sutrisno, 2018).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Papuyu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

dan penghambat dalam pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini menggunakan kerangka analisis efektivitas program yang dikemukakan oleh Sutrisno (Sutrisno, 2018) dengan lima dimensi yaitu pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

## METODE

Penelitian ini mengkaji efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Papuyu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada kemampuannya mengungkap secara mendalam pelaksanaan PKH dari sudut pandang para pelaksana dan penerima manfaat. Informan ditetapkan melalui teknik purposive sampling dan berjumlah 12 orang, mencakup Koordinator PKH Kabupaten, Koordinator PKH Kecamatan yang juga bertugas sebagai Pendamping PKH Desa Sungai Papuyu, Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta delapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diseleksi berdasarkan keragaman komponen bantuan, durasi kepesertaan, dan tingkat partisipasi dalam program (Sugiyono, 2020).

Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan merujuk pada lima dimensi efektivitas program yang dirumuskan oleh Sutrisno (2018), yaitu pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata. Proses analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi. Keabsahan temuan dijamin melalui uji kredibilitas berupa perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan metode, analisis kasus negatif, penggunaan bahan referensi, dan *member check.*

## PEMBAHASAN

### Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH)

#### 1. Pemahaman Program

a. Pemahaman Tentang Program

Temuan penelitian di Desa Sungai Papuyu mengindikasikan bahwa pemahaman kelompok sasaran terhadap Program Bantuan Sosial PKH masih belum efektif. Sebagian besar informan, baik dari unsur pelaksana maupun penerima manfaat, hanya memahami program ini secara parsial sebagai bantuan tunai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, seperti pembelian seragam, buku, dan perlengkapan sekolah. Pemahaman yang bersifat komprehensif mengenai cakupan program yang juga menyasar ibu hamil, balita, dan lansia belum terdistribusi secara merata. Observasi lapangan mengonfirmasi adanya disparitas tingkat pemahaman antar masyarakat, yang disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap sosialisasi dan latar belakang pendidikan, sehingga persepsi mereka belum sepenuhnya merepresentasikan tujuan multidimensional PKH.

Temuan empiris ini menunjukkan adanya deviasi terhadap konsep efektivitas yang diajukan Edy Sutrisno, di mana pemahaman program oleh kelompok sasaran merupakan indikator fundamental untuk menilai keberhasilan suatu intervensi. Secara analitis, dimensi pemahaman yang dimaksud teori tersebut menuntut adanya pengertian holistik terhadap perencanaan, mekanisme, dan spektrum sasaran program, bukan sekadar pengenalan manfaat instrumental yang diterima secara langsung. Realitas di lapangan memperlihatkan bahwa tingkat kognisi masyarakat hanya mencapai tahap pengenalan manfaat spesifik,

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

khususnya komponen pendidikan, sehingga secara substansial belum memenuhi ambang batas pemahaman yang dipersyaratkan untuk menyatakan program berjalan efektif. Dengan demikian, hasil penelitian ini mengonfirmasi posisi teori tersebut dengan menyediakan bukti bahwa pemahaman yang fragmentaris dan tidak komprehensif secara langsung berkontribusi pada belum tercapainya efektivitas program di tingkat akar rumput.

b. Sosialisasi

Sosialisasi Program Bantuan Sosial PKH di Desa Sungai Papuyu terbukti belum efektif. Temuan empiris mengungkapkan bahwa pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan antara pendamping dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak berjalan secara konsisten. Inkonsistensi jadwal, yang bervariasi antara bulanan hingga triwulanan dan kerap mengalami keterlambatan, menjadi kendala utama. Rendahnya partisipasi akibat kesibukan masyarakat serta lemahnya koordinasi antara pendamping dan pemerintah desa dalam menyebarkan informasi turut memperparah keadaan. Akibatnya, distribusi pengetahuan tidak merata karena penyampaian materi hanya berfokus pada kelompok tertentu sehingga spektrum luas penerima manfaat tidak tersentuh informasi yang komprehensif.

Temuan ini menunjukkan deviasi dari indikator efektivitas program yang dikemukakan Edy Sutrisno, di mana sosialisasi semestinya menjadi wahana penyampaian informasi yang jelas guna membangun pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat. Secara analitis, teori tersebut menekankan esensi konsistensi dan pemerataan distribusi informasi sebagai prasyarat internalisasi tujuan program. Realitas di lapangan justru memperlihatkan kegagalan memenuhi dimensi tersebut; ketidakteraturan frekuensi dan segmentasi audiens menciptakan kesenjangan kognitif di kalangan penerima manfaat. Alhasil, proses transfer pengetahuan tidak berjalan optimal sehingga menghambat terbentuknya keterlibatan kolektif yang diidealkan. Hal ini mempertegas bahwa defisiensi pada dimensi konsistensi dan ekualitas penyebaran informasi secara langsung mengerosi potensi efektivitas sosialisasi, mengonfirmasi premis teori bahwa sosialisasi yang buruk menghasilkan pemahaman publik yang fragmentaris.

**2. Tepat Sasaran**

a. Ketepatan penerima manfaat

Ketepatan sasaran Program PKH di Desa Sungai Papuyu terbukti belum efektif. Mayoritas penerima memang memenuhi komponen formal seperti keluarga dengan anak sekolah, balita, dan ibu hamil, namun kesenjangan distribusi masih nyata. Kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas justru kerap tidak terdata sebagai penerima, sementara beberapa keluarga dengan kondisi ekonomi relatif mampu masih terdaftar. Ketidakakuratan ini bersumber dari basis data yang tidak mutakhir, terbatasnya verifikasi lapangan, dan ketergantungan pada sistem aplikasi Kementerian Sosial yang belum responsif terhadap dinamika kemiskinan lokal.

Temuan ini mengonfirmasi dan memperluas pemahaman atas indikator ketepatan penerima manfaat dari Edy Sutrisno, yang menegaskan bahwa program tepat sasaran hanya jika diterima oleh pihak yang benar-benar membutuhkan. Deviasi antara kriteria normatif program dan realitas penerima menunjukkan bahwa pemenuhan administratif komponen PKH belum menjamin akurasi sasaran; kehadiran inklusi dan eksklusi secara simultan menandakan bahwa indikator ini bersifat dinamis dan menuntut pemutakhiran data berkelanjutan. Secara analitis, kegagalan menyelaraskan data formal dengan kondisi empiris memperlemah validitas distribusi bantuan. Dengan demikian, studi ini menegaskan

bahwa efektivitas ketepatan sasaran tidak sekadar bertumpu pada kesesuaian kriteria statis, melainkan meniscayakan integrasi verifikasi berkelanjutan sebagai implikasi teoritis yang krusial.

b. Kesesuaian program dengan kebutuhan dan harapan Masyarakat

Kesesuaian Program Bantuan Sosial PKH dengan kebutuhan dan harapan masyarakat di Desa Sungai Papuyu telah terbukti efektif. Bantuan yang diterima dinilai sangat membantu pemenuhan kebutuhan pokok keluarga sasaran, terutama dalam mendukung biaya pendidikan anak seperti pembelian seragam, buku, dan perlengkapan sekolah. Meskipun nominal bantuan belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan ekonomi secara total, masyarakat penerima merasakan keringanan beban pengeluaran yang signifikan. Di sisi lain, masih muncul harapan agar penyaluran bantuan lebih merata hingga menjangkau seluruh keluarga pra-sejahtera yang belum terdata, menandakan adanya celah inklusivitas yang perlu dicermati.

Temuan ini secara langsung mendukung dan memperkuat indikator kesesuaian program dalam kerangka teori Edy Sutrisno, yang menegaskan bahwa tingkat keberhasilan program berbanding lurus dengan keselarasan antara intervensi dan kebutuhan nyata masyarakat. Persepsi positif mayoritas penerima manfaat menunjukkan bahwa desain bantuan PKH telah berhasil menerjemahkan kebutuhan dasar kelompok sasaran ke dalam komponen bantuan riil, khususnya pada dimensi pendidikan. Kesesuaian ini menciptakan legitimasi sosial dan rasa memiliki yang menjadi fondasi keberhasilan implementasi. Secara analitis, terpenuhinya indikator kesesuaian berfungsi sebagai katalisator efektivitas, karena program yang relevan secara kontekstual akan meminimalkan resistensi dan memaksimalkan partisipasi. Implikasi teoritisnya, studi ini menegaskan bahwa keselarasan antara substansi program dan ekspektasi empiris masyarakat merupakan determinan fundamental bagi keberhasilan suatu intervensi sosial.

**3. Tepat Waktu**

a. Pelaksanaan program

Ketepatan waktu pelaksanaan Program Bantuan Sosial PKH di Desa Sungai Papuyu tergolong cukup efektif. Penyaluran dana bantuan terbukti konsisten dilakukan setiap tiga bulan sekali sesuai ketentuan, sementara kegiatan pertemuan dan pendampingan oleh para pendamping bersama pemerintah desa tetap berlangsung secara berkala. Kendati demikian, jadwal pasti pelaksanaan pertemuan masih bersifat fleksibel karena menyesuaikan agenda koordinasi di lapangan dan sesekali mengalami penundaan akibat kendala teknis dari bank penyalur. Namun demikian, fleksibilitas ini tidak mengganggu aktivitas harian penerima manfaat dan akses pencairan dinilai mudah, sehingga pelaksanaan program secara umum tetap berjalan sesuai rencana.

Temuan ini sejalan dengan indikator “tepat waktu” dari Edy Sutrisno yang menekankan pentingnya kesesuaian penggunaan waktu dalam pelaksanaan program terhadap jadwal yang telah dirancang. Keteraturan pencairan setiap tiga bulan menunjukkan adanya kepatuhan terhadap siklus penyaluran baku, yang mendukung terbangunnya prediktabilitas bagi penerima manfaat. Meskipun terdapat fluktuasi tanggal pertemuan, hal tersebut tidak secara fundamental mengikis efektivitas karena momen distribusi manfaat tetap terjamin periodisitasnya. Secara analitis, kasus ini mengonfirmasi bahwa efektivitas ketepatan waktu tidak semata-mata diukur dari presisi tanggal, melainkan dari kemampuan menjaga rentang waktu yang konsisten sehingga masyarakat dapat mengantisipasi penerimaan bantuan. Implikasi teoritisnya, dimensi ketepatan waktu

perlu dipahami sebagai keterjaminan akses periodik yang stabil, bukan sekadar kepatuhan terhadap kalender statis.

b. Kesesuaian waktu pelaksanaan

Kesesuaian waktu pelaksanaan Program Bantuan Sosial PKH di Desa Sungai Papuyu tergolong cukup efektif. Pencairan dana bantuan tetap berjalan dalam siklus tiga bulanan sesuai ketentuan Kementerian Sosial, sehingga secara umum tidak mengganggu aktivitas harian penerima manfaat. Namun, ketidakpastian tanggal pasti pencairan masih terjadi akibat proses verifikasi data dan kendala teknis bank penyalur, yang kerap menyebabkan keterlambatan beberapa hari dan memaksa penerima untuk rutin mengecek ATM. Kegiatan pertemuan dan pendampingan juga sering mengalami penyesuaian jadwal yang mengakibatkan sebagian warga tidak hadir, meskipun fleksibilitas ini masih dapat ditoleransi oleh masyarakat.

Temuan ini mendukung indikator kesesuaian waktu pelaksanaan dari Edy Sutrisno, yang menyatakan bahwa program efektif jika dilaksanakan pada waktu yang tepat sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat dan memberikan hasil maksimal. Di satu sisi, siklus pencairan tiga bulanan telah menciptakan ritme yang selaras dengan ritme kebutuhan masyarakat sehingga aktivitas ekonomi penerima tidak terganggu. Namun, variabilitas tanggal pencairan dan perubahan jadwal pertemuan menimbulkan ketidakpastian yang dapat menghambat perencanaan pemanfaatan bantuan. Secara analitis, kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas dimensi kesesuaian waktu tidak hanya menuntut ketiadaan gangguan, melainkan juga mensyaratkan prediktabilitas waktu yang konsisten. Implikasi teoritisnya, kesesuaian waktu yang ideal harus mencakup keterjaminan momen pelaksanaan yang stabil, bukan sekadar ketepatan periode makro.

**4. Tercapainya Program**

a. Tercapainya Tujuan Program

Pencapaian tujuan Program Bantuan Sosial PKH di Desa Sungai Papuyu tergolong cukup efektif, meskipun belum optimal. Bantuan yang diterima terbukti membantu meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya dalam menunjang biaya pendidikan anak seperti pembelian perlengkapan sekolah dan kebutuhan dasar. Namun, mayoritas penerima manfaat menyatakan bahwa nominal bantuan belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan keluarga hingga periode pencairan berikutnya, sehingga mereka masih harus mencari tambahan penghasilan. Selain itu, belum seluruh kelompok sasaran prioritas, seperti lansia, terjangkau secara merata akibat kendala data. Dengan demikian, program baru berhasil memberikan dukungan parsial dan belum menghasilkan perubahan kesejahteraan yang signifikan secara menyeluruh.

Temuan ini memperkuat indikator pencapaian tujuan dari Edy Sutrisno yang menekankan bahwa keberhasilan program diukur dari tingkat ketercapaian sasaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara analitis, tercapainya fungsi bantuan sebagai penopang kebutuhan dasar pendidikan mengonfirmasi adanya progres positif pada dimensi ini. Namun, ketidakmampuan program menutup keseluruhan kebutuhan esensial penerima dan masih adanya eksklusi pada segmen rentan menunjukkan bahwa target substansial kesejahteraan belum terpenuhi secara penuh. Kesenjangan antara capaian prosedural dan dampak transformatif ini menandakan bahwa efektivitas pencapaian tujuan tidak hanya bergantung pada realisasi distribusi, melainkan juga pada kecukupan dan inklusivitas intervensi. Implikasi teoritisnya, pencapaian tujuan yang efektif mensyaratkan

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

sinergi antara ketepatan sasaran dan kecukupan manfaat agar mampu menghasilkan perubahan kondisi sosial ekonomi yang berkelanjutan.

b. Terciptanya Kemandirian bagi penerima program

Penciptaan kemandirian penerima Program Bantuan Sosial PKH di Desa Sungai Papuyu terbukti kurang efektif. Seluruh lapisan informan, mulai dari koordinator hingga penerima manfaat, secara konsisten menyatakan bahwa bantuan yang diterima baru sebatas meringankan beban konsumtif, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak dan pengeluaran harian. Tidak ditemukan indikasi perubahan kondisi ekonomi yang signifikan; mayoritas keluarga penerima justru masih sepenuhnya menggantungkan pemenuhan kebutuhan pokok pada bantuan tunai tersebut. Alih-alih menjadi stimulus produktivitas, dana PKH difungsikan sebagai penopang darurat yang habis sebelum periode pencairan berikutnya, sehingga ketergantungan struktural terhadap program tetap mengakar.

Temuan ini menunjukkan deviasi mendasar dari indikator "terciptanya kemandirian" yang dikemukakan Edy Sutrisno, di mana keberhasilan program seharusnya mewujud dalam berkurangnya ketergantungan terhadap bantuan sosial dan membaiknya kondisi ekonomi secara mandiri. Secara analitis, kesenjangan antara realitas empiris dan ideal teori ini terletak pada orientasi pemanfaatan bantuan yang seluruhnya terserap pada pemenuhan kebutuhan dasar jangka pendek tanpa diimbangi akumulasi kapasitas ekonomi produktif. Bantuan PKH mampu menjalankan fungsi protektif, namun gagal menjalankan fungsi transformatif yang menjadi esensi kemandirian. Dengan demikian, hasil studi ini menegaskan kembali premis teori tersebut dengan memberikan bukti empiris bahwa efektivitas program secara holistik tidak dapat diklaim jika dimensi proteksi sosial belum beranjak menjadi kapasitas kemandirian penerima yang berkelanjutan.

**5. Perubahan Nyata**

a. Perubahan kondisi Sosial ekonomi masyarakat

Dampak Program Bantuan Sosial PKH terhadap perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat di Desa Sungai Papuyu masih tergolong terbatas dan belum efektif secara transformatif. Manfaat yang dirasakan penerima hanya bersifat membantu meringankan beban pengeluaran jangka pendek, terutama untuk kebutuhan pendidikan anak dan kesehatan dasar, sehingga memberikan sedikit kelegaan finansial. Namun, perubahan signifikan pada struktur ekonomi keluarga atau peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan belum tercapai. Kondisi ekonomi mayoritas penerima tetap statis, pendapatan rumah tangga tidak mengalami peningkatan berarti, dan ketergantungan terhadap bantuan tunai masih tinggi, menandakan bahwa dampak program belum menyentuh dimensi kemandirian.

Temuan ini mengonfirmasi indikator dampak program dari Edy Sutrisno, yang menekankan bahwa tolok ukur utama keberhasilan program terletak pada hasil nyata berupa peningkatan kesejahteraan, perubahan pola hidup, atau peningkatan pengetahuan. Dampak yang muncul di lapangan baru sebatas fungsi protektif sementara, belum bergeser ke arah transformatif yang memberdayakan. Secara analitis, hal ini menunjukkan bahwa bantuan tunai tanpa intervensi pemberdayaan ekonomi hanya mampu meredam guncangan konsumsi, bukan mengubah posisi sosial ekonomi penerima. Oleh karena itu, implikasi teoritis dari studi ini menegaskan bahwa efektivitas dampak program tidak cukup diukur dari terpenuhinya kebutuhan dasar sesaat, melainkan harus pula mencakup kapasitas program dalam mendorong mobilitas ekonomi vertikal penerima manfaat.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

b. Kebermanfaatan program bagi penerima program

Kebermanfaatan Program Bantuan Sosial PKH di Desa Sungai Papuyu dinilai cukup efektif karena memberikan manfaat langsung yang nyata bagi penerima. Bantuan secara signifikan membantu meringankan beban pengeluaran rumah tangga, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak seperti perlengkapan sekolah dan biaya harian, serta mencukupi kebutuhan dasar balita. Sebagian penerima bahkan dapat menyisihkan dana sebagai tabungan darurat. Namun, manfaat tersebut bersifat temporer dan terbatas pada konsumsi jangka pendek. Masyarakat masih belum mampu melepaskan diri dari ketergantungan terhadap bantuan, sehingga kualitas hidup belum meningkat secara berkelanjutan, dan fungsi program baru sebatas jaring pengaman sosial.

Temuan ini memberikan nuansa pada indikator kebermanfaatan yang digagas Edy Sutrisno, yang mensyaratkan program mampu meningkatkan kualitas hidup dan berlanjut meskipun intervensi telah berakhir. Data empiris mendukung klaim manfaat pada dimensi ekonomi langsung, tetapi secara kritis menunjukkan ketidakmampuan program menciptakan efek keberlanjutan yang mandiri. Hal ini menandakan bahwa manfaat instan belum bertransformasi menjadi kapasitas adaptif jangka panjang. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa kebermanfaatan tidak cukup diukur dari terpenuhinya kebutuhan sesaat; efektivitas hakikinya sangat bergantung pada kemampuan program menanamkan daya lenting ekonomi agar kualitas hidup tetap terjaga pasca-intervensi.

**Faktor-Faktor Yang Mempengaruh Efektivitas program keluarga harapan (PKH)**

Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sungai Papuyu didukung oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, kerja sama yang baik antara koordinator PKH, pendamping, pemerintah desa, dan penerima manfaat tercermin dari koordinasi yang lancar, komunikasi efektif, serta pembagian tugas yang jelas sehingga pelaksanaan program berjalan tertib. Kedua, pemenuhan kewajiban oleh penerima manfaat, seperti memastikan anak tetap bersekolah, mengikuti posyandu, dan menghadiri pertemuan rutin, menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan program yang mendukung pencapaian tujuan. Ketiga, peran aktif pendamping PKH dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan arahan mengenai tujuan serta pemanfaatan bantuan membantu masyarakat memahami program secara tepat dan mengarahkan penggunaan bantuan untuk peningkatan kesejahteraan. Ketiga faktor ini secara bersama-sama memperkuat pelaksanaan PKH dan mendorong tercapainya sasaran program.

Namun, efektivitas PKH juga dihambat oleh sejumlah faktor yang saling memengaruhi. Belum terciptanya kemandirian ekonomi terlihat dari ketergantungan masyarakat pada bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sementara perubahan data penerima yang tidak diperbarui menyebabkan ketidaktepatan sasaran karena masih terdapat keluarga layak yang belum terdaftar atau penerima yang kondisi ekonominya sudah membaik namun belum dikeluarkan. Keterbatasan kuota penerima memperparah ketimpangan akibat banyak warga miskin yang tidak terakomodasi. Ketidakpastian jadwal pencairan yang mengikuti kebijakan pusat juga menyulitkan penerima dalam merencanakan penggunaan bantuan. Akumulasi hambatan tersebut menyebabkan tujuan program untuk menciptakan kemandirian dan kesejahteraan merata belum tercapai sepenuhnya, sebab manfaat masih dirasakan secara parsial dan belum mampu mengubah kondisi ekonomi penerima secara berkelanjutan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian, efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Papuyu, Kecamatan Babirik, Kabupaten Hulu Sungai Utara, secara keseluruhan tergolong belum efektif. Analisis terhadap lima dimensi efektivitas program menunjukkan kondisi yang beragam. Pemahaman masyarakat masih terbatas pada bantuan tunai untuk pendidikan, tanpa pemahaman komprehensif terhadap tujuan kesehatan dan kesejahteraan sosial, serta sosialisasi yang belum merata. Dimensi tepat sasaran belum efektif karena masih terdapat warga layak yang belum terdaftar dan penerima yang kondisi ekonominya telah membaik. Pada dimensi tepat waktu, pelaksanaan tahapan program cukup efektif, namun ketidakpastian jadwal dan keterlambatan pencairan masih menjadi kendala. Dimensi tercapainya tujuan menunjukkan kondisi cukup efektif dalam meringankan beban pengeluaran, tetapi belum efektif dalam menciptakan kemandirian ekonomi karena keluarga penerima manfaat masih bergantung pada bantuan. Adapun dimensi perubahan nyata tergolong cukup efektif, meskipun perubahan kondisi sosial-ekonomi belum signifikan dan manfaatnya belum sepenuhnya menciptakan keberlanjutan ekonomi jangka panjang. Temuan ini diperkuat oleh identifikasi faktor pendukung, yaitu kerja sama pelaksana, pemenuhan kewajiban penerima, dan peran aktif pendamping, serta faktor penghambat seperti belum terciptanya kemandirian ekonomi, data penerima yang tidak termutakhirkan, keterbatasan kuota, dan ketidakpastian jadwal pencairan.

Makna dari temuan tersebut menegaskan bahwa efektivitas PKH tidak semata-mata ditentukan oleh ketepatan penyaluran bantuan, melainkan sangat bergantung pada pemahaman masyarakat terhadap esensi program, kesiapan penerima dalam mengelola bantuan secara produktif, dan keberadaan sistem pendukung yang memadai. Rendahnya efektivitas pada dimensi pemahaman, tepat sasaran, dan penciptaan kemandirian menunjukkan bahwa bantuan sosial yang bersifat konsumtif tanpa diiringi penguatan kapasitas ekonomi hanya mampu memberikan efek jangka pendek dalam mengurangi beban pengeluaran. Akibatnya, sebagian besar penerima belum mampu beralih dari ketergantungan menuju kemandirian, sehingga tujuan transformatif program belum tercapai sepenuhnya. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa keberhasilan program perlindungan sosial mensyaratkan integrasi antara bantuan tunai dan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sebagaimana diisyaratkan dalam kebijakan Kementerian Sosial. Dengan demikian, kesenjangan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan pencapaian kemandirian menjadi faktor kunci yang menjelaskan mengapa efektivitas PKH di lokasi penelitian masih bersifat parsial.

Berdasarkan simpulan tersebut, implikasi praktis dari penelitian ini menuntut adanya perbaikan sistemik pada pelaksanaan PKH. Pemerintah perlu memperkuat mekanisme pemutakhiran data penerima secara berkala dan terpadu untuk memastikan ketepatan sasaran, serta meningkatkan intensitas dan kualitas sosialisasi yang menekankan tujuan menyeluruh program, bukan sekadar aspek bantuan tunai. Pemerintah desa dan pendamping PKH harus membangun koordinasi yang lebih erat dalam pembaruan data dan pelaksanaan pendampingan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi keluarga penerima manfaat. Masyarakat penerima manfaat diharapkan dapat memanfaatkan bantuan secara bijaksana dan secara bertahap menginisiasi kegiatan produktif guna mengurangi ketergantungan. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian ini dengan menggunakan variabel, indikator, atau metode yang berbeda, serta memperluas cakupan lokasi, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas PKH dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan.

ISSN : 3063-3664
Vol. 3, No. 4, 2026

**DAFTAR PUSTAKA**

Aziz, S.S. (2024) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat di Desa Pamanukan Hilir Kecamatan Pamanukan Subang'.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Hulu Sungai Utara (2025) 'Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2025'. Amuntai.

Fiszbein, A. and Schady, N. (2009) *Conditional Cash Transfers: Reducing Present and Future Poverty*. Washington, DC: World Bank Publications.

Hastuti, P., Suryadarma, D. and Bazzi, S. (2020) 'The Impact of Conditional Cash Transfer on Household Welfare in Indonesia', *Journal of Development Economics*, 45(2), pp. 112–128.

Haswanti (2024) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan pada Masyarakat Miskin di Desa Basseng Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang'.

Husaini, M. (2022) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) untuk Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Desa Kota Raja Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara'.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (2018) 'Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan'. Jakarta.

Kementerian Sosial Republik Indonesia (2021) 'Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Tahun 2021'. Jakarta.

Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 4th edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Rahma, F.A. (2021) 'Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong'.

Sugiyono (2020) *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R\&D*. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, E. (2018) *Budaya Organisasi*. Prenadamedia Group.

'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin' (2011). Jakarta: Sekretariat Negara.

World Bank (2020) 'Indonesia Poverty Reduction and Social Protection'. Available at: https://www.worldbank.org/en/country/indonesia (Accessed: 12 July 2026).